

ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Yaman Suryaman

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * yamanstia@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pengukuran kinerja organisasi sektor publik merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu melakukan penilaian dalam pencapaian tujuan melalui strategi yang dapat diukur melalui penggunaan keuangan dan non keuangan. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pendapatannya yang umumnya dikelola oleh suatu badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Berdasarkan penelitian menunjukan pertama, kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi di bidangnya masih perlu ditingkatkan, kedua masih sulitnya Organisasi Perangkat Daerah untuk beradaptasi dan melaksanakan berbagai kebijakan karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat, ketiga, belum optimal dan terintegrasinya penerapan pengelolaan keuangan daerah (e-government) berbasis teknologi informasi untuk mendukung ketepatan dan ketepatan waktu kerja, keempat masih terdapat aset daerah yang kepemilikannya belum tersertifikasi dan masih terdapat aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah, dan terakhir sistem pemutakhiran data wajib pajak daerah belum optimal.

Kata kunci: Kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik mengacu pada semua organisasi pemerintah, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai kepada pemerintahan daerah. Organisasi sektor publik fokus pada layanan kepada publik secara keseluruhan, termasuk pelayanan bidang pendidikan, pelayanan bidang kesejahteraan, kebijakan yang mengatur berbagai kepentingan publik, kesempatan kerja bagi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan layanan pelayanan bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan tergantung kepada cara organisasi publik melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi terutama dalam memberikan pelayanan publik secara prima.

Sektor publik memainkan peran penting dalam memastikan berfungsinya pelayanan kepada masyarakat atau publik, selain itu organisasi sektor publik memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pendanaan untuk layanan publik di Indonesia umumnya diperoleh melalui berbagai metode, termasuk berasal dari sektor pajak, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta bantuan keuangan dari tingkat pemerintahan pusat maupun berasal dari provinsi. Otonomi daerah yang berjalan saat ini telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimilikinya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian kinerja organisasi yang ada di daerah menjadi sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunannya.

Definisi dari organisasi publik dikemukakan Fahmi (2013, hal. 1) dengan menyatakan bahwa: "Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya". Organisasi publik merupakan semua bentuk organisasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan organisasi publik diatur oleh peraturan yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsinya dalam upaya membantu menjalankan roda pemerintahan. Setiap organisasi publik dituntut memiliki kinerja yang baik dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara sah, tidak cukup hanya menilai kinerja organisasi publik semata-mata dengan menggunakan ukuran atau indikator. Indikator yang melekat pada organisasi dapat dilihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dilihat dari indikator yang melekat pada pengguna layanan, seperti kepuasan pengguna layanan, tanggung jawab dan daya tanggap. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena organisasi publik seringkali memiliki otoritas, sehingga pengguna jasa tidak memiliki sumber layanan lainnya (Maryuni, 2016).

Pencapaian hasil kerja organisasi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya keterbatasan peralatan dan teknologi yang digunakan, kondisi internal pegawai, dan sarana dan prasarana yang belum memadai (Agatha, 2020). Keberhasilan kinerja organisasi diperlukan adanya dukungan, terutama ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, serta tersedianya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai dalam mencapai target yang telah ditetapkan organisasi. Tanpa adanya dukungan tersebut menjadi sebuah keniscayaan sebuah organisasi dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak. Organisasi sektor publik tidak terlepas dari sejauhmana pemerintah sendiri memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan adanya beberapa faktor dalam mencapai keberhasilan kinerja organisasi publik, dimana diantaranya lingkungan yang strategis, budaya organisasi, dan perencanaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi (Rifki, 2016). Kinerja organisasi di sektor publik dapat dilihat dari bagaimana organisasi melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuannya. Manajemen kinerja organisasi dalam konteks pemerintahan dapat dipandang sebagai kegiatan pemerintah atau lembaganya dalam merencanakan, melaksanakan, meninjau, mengevaluasi dan melaporkan efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan, pelaksanaan program, dan pencapaian tugas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Definisi kinerja organisasi menurut Bastian (Hessel, 2005, hal. 175) menyatakan bahwa: “Kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut”. Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu pencapaian atau hasil kerja dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dalam bentuk program yang telah direncanakan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Kinerja organisasi publik yang terjadi pada saat ini menghadapi masalah utama, dimana dengan adanya bencana global pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah mempengaruhi arah kebijakan belanja bagi setiap daerah, termasuk bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai arahan pemerintah Pusat Kebijakan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan ekonomi pasca Covid -19. Kebijakan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta Keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan skala prioritas yang sangat selektif dalam memilih prioritas program.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan anggaran yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga terdapat target output, outcome dan sasaran yang berubah menyesuaikan dengan keadaan akibat dampak perubahan anggaran tersebut yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya peran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dimana metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008, hal. 3). Penggunaan metode studi literatur sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Metode studi literatur merupakan suatu cara pemecahan masalah dengan menelusuri sumber-sumber data yang telah ditulis sebelumnya.

Dalam proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting, yaitu pertama proses editing, dengan pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain, kedua organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan, dan ketiga finding, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah; c. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bagian dari pelaksanaan misi dan fungsinya serta pencapaian kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja, BPKPD mengandalkan sumber daya manusia yang secara substansial kompeten dan sesuai bidangnya. Hingga akhir tahun 2021, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memiliki 95 pegawai. Adapun yang menjadi sasaran dan indikator sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2021-2026, meliputi

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator sasaran rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu dan laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dengan indikator sasaran persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, dengan indikator sasaran persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai alasan pencapaian atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan penilaian kinerja terhadap kesepakatan kinerja yang telah disepakati. Evaluasi ini dilakukan oleh tim manajemen kinerja dengan mengumpulkan data kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, BPKPD menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 886.918.967.644,- dan realisasi sebesar Rp. 876.853.223.118,- maka persentase realisasi anggaran adalah 98,87%. Tahun 2021 merupakan masa transisi Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada BAB III, Pasal 3, Ayat (2) disebutkan bahwa “Perubahan Renja Tahun 2021 dan Renja Tahun 2022 menjadi bagian dari Renstra Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati”. Sehingga RENSTRA BPKPD pun mengalami beberapa penyesuaian khususnya untuk penentuan tujuan organisasi agar kinerja BPKPD dapat lebih baik dan terarah.

Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 terdapat beberapa perubahan indikator kinerja dari Renstra sebelumnya, sehingga dilakukan penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. BPKPD menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp. 886.918.967.644,- dan realisasi sebesar Rp. 876.853.223.118,- maka persentase realisasi anggaran adalah 98,87%. Hasil penilaian laporan keuangan n-1 dimana capaian Indikator Opini laporan keuangan pada tahun 2021 merupakan penilaian terhadap dokumen laporan keuangan tahun 2020. Pada tahun 2017, 2018 dan 2020 mendapatkan nilai opini keuangan WTP terhadap laporan keuangan tahun 2016, 2017 dan 2019 hal tersebut dapat tercapai dikarenakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tasikmalaya telah baik, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2019 (penilaian laporan keuangan tahun 2018) tidak dapat mempertahankan nilai tersebut dikarenakan Realisasi opini keuangan yang didapat

yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil WDP pada tahun 2019 didapat dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan juga adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang didapat pada tahun 2021 telah memenuhi target WTP sehingga pencapaian kinerja menunjukkan persentase 100%. Faktor pendukung perolehan WTP yaitu pada aset tetap yang telah disajikan dengan wajar. Indikator tujuan ini didukung oleh 2 (dua) dua sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran. Diharapkan pengelolaan keuangan semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian karena pencapaian nilai opini tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan PAD dihitung dari selisih realisasi PAD tahun N dengan tahun N-1 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun N-1. Pada tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp. 374.924.483.900,50 dan tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 305.887.233.378,47,- atau tumbuh sebesar 22,57%.

Pertumbuhan tersebut di atas dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Capaian pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2021 salah satunya didominasi dari sektor pajak daerah, keberhasilan capaian tersebut karena beberapa faktor diantaranya: 1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak; 2) Pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa Pendataan Objek Pajak Bangunan PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pendataan Objek Pajak Daerah Non PBB, Pemuktahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Penilaian Individual; 3) Pelaksanaan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak perorangan dan perusahaan.

Capaian indikator kinerja yaitu berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD Kabupaten Tasikmalaya telah mengelola BMD dengan baik, namun masih ada beberapa SKPD yang belum tertib dalam melakukan pengelolaan BMD. Pada awal tahun 2021 terdapat 4 SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD di masing-masing SKPD nya. Dan pada akhir tahun 2021 ditargetkan 3 SKPD yang belum tertib BMD dan terealisasi SKPD yang belum tertib BMD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Selanjutnya capaian indikator kinerja Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan tahun 2021, jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 118 dokumen terdiri dari dokumen belanja operasional gaji dan tunjangan 90 dokumen, dokumen belanja bansos 2 dokumen, dokumen

belanja hibah 2 dokumen, dokumen belanja operasional lainnya 11 dokumen, dokumen belanja transfer 12 dokumen dan dokumen belanja tidak terduga 1 dokumen. Dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran selanjutnya dilihat dari capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKPD dengan mutu pelayanan sangat baik, hal ini tercermin dari hasil rata-rata IKM BPKPD dari 12 (dua belas) jenis pelayanan pada Tahun 2021 dengan nilai 86,03 sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD adalah 100,04% dari target sebesar 86. Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKPD Kab. Tasikmalaya.

Sementara capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah, diketahui pada Tahun 2021, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 89.383.145.412,- dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 75.239.545.192,- atau 84,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp 5.551.155.671,- meningkat 7,97% dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pertumbuhan pajak daerah. Peningkatan pertumbuhan pajak daerah tersebut terjadi karena adanya geliat perekonomian pasca pandemi covid-19, sehingga pencapaian terhadap pendapatan pajak daerah bertambah. Realisasi pajak daerah dibandingkan dengan target tercapai 84,18% namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian tersebut meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan dalam mencapai kinerja organisasi pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya terdapat faktor penghambat diantaranya; 1) Kemampuan ASN yang memiliki kompetensi di bidangnya masih kurang; 2) masih adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada serta sulitnya OPD dalam beradaptasi dan implementasi akibat adanya perubahan yang cepat pada peraturan perundang-undangan tersebut; 3) belum optimal dan terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi (egovernment) dalam mendukung akurasi dan kecepatan kerja di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya; dan 4) masih terdapat aset daerah yang belum tersertifikasi kepemilikannya dan masih terdapat aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah; serta 5) belum optimalnya sistem pemutakhiran data wajib pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha D.R.M, (2020). Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/1672>
- Fahmi. (2013). *Pengantar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

- Maryuni, S(2016). Kinerja Organisasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/article/view/1044>
- Rifki, S(2016). Analisis Kinerja Organisasi Publik pada PDAM Kota Mojokerto. <Http://Ejournal.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Idg/Article/View/2280>
- Hessel, N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.